
**ANALISIS KINERJA BELANJA PADA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN ASMAT PROVINSI PAPUA****PERFORMANCE ANALYSIS OF EXPENDITURE AT THE LOCAL GOVERNMENT COUNTY OF
ASMAT PROVINCE OF PAPUA**

Oleh:
Fransiskus X.W Katit¹
Sherly Pinatik²

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado

Email:

¹fxwatkenkatit@gmail.com

²sherlee79@yahoo.co.id

Abstrak: Belanja Daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran merupakan komponen penting yang mengundang perhatian publik. Hal itu disebabkan karena masyarakat sebagai pemberi dana publik melalui pajak daerah yang mereka bayarkan berkepentingan untuk mengetahui apakah dana tersebut telah digunakan dengan semestinya, efisien, efektif, dan berorientasi pada kepentingan publik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Kinerja Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat Provinsi Papua, yang disusun dengan metode analisis kuantitatif. Selama tahun 2013-2015 Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat memanfaatkan anggaran belanja dengan baik dimana realisasi belanja yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat lebih kecil dari Anggaran yang telah direncanakan. Dari beberapa analisis yang telah dilakukan Pemerintah daerah Kabupaten Asmat Sudah menunjukkan hasil yang positif dalam kinerja belanja. Namun pemerintah daerah lebih mempertimbangkan dimana belanja yang di dalamnya mengenai kepentingan umum harus lebih ditingkatkan.

Kata kunci: Belanja Daerah.

Abstract: Territory expenditure in the realization of the Budget Report is an important component that invite public attention. It is because the community as a public funder through local tax they pay interest to know whether these funds have been used properly, efficiently, effectively, and oriented to the public interest. The purpose of this research is to know the performance of local Government District expenditure Asmat province of Papua, which is compiled by the method of quantitative analysis. During the 2013-2015 Asmat District local government utilizes the budget well where the realization of the expenditure has been done by the local government County of Asmat is smaller than the planned Budget. From some of the analysis that has been done the local government County of Asmat showed positive results in the performance of expenditure. But local governments more considering where expenditure in it.

Keywords: Territory Expenditure.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Di era otonomi sekarang ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuan implementasi otonomi daerah antara lain untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi.

Anggaran berbasis kinerja secara struktur meliputi anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan. Penekanan pada belanja daerah menjadi titik perhatian terutama sisi belanja membutuhkan kinerja yang lebih baik, transparan dan tepat sasaran. Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran merupakan komponen penting yang mengundang perhatian publik. Hal itu disebabkan karena masyarakat sebagai pemberi dana publik (publik fund) melalui pajak daerah yang mereka bayarkan berkepentingan untuk mengetahui apakah dana tersebut telah digunakan dengan semestinya, efisien, efektif, dan berorientasi pada kepentingan publik. Belanja daerah tersebut juga mencerminkan kebijakan menghasilkan pendapatan merupakan suatu hal yang lebih sulit dibandingkan membelanjakan. Kaeran sifat belanja yang relatif mudah dilakukan dan rentan akan terjadinya inefisiensi dan kebocoran, maka perencanaan, pengendalian dan pengawasan terhadap belanja sangat penting dilakukan. Setelah dibelanjakan dan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran, analisis terhadap belanja ini pun mutlak harus dilakukan untuk dijadikan dasar evaluasi, koreksi dan perbaikan ke depan.

Kinerja pemerintah sangat penting untuk dilihat dan diukur. Keberhasilan suatu pemerintahan di era otonomi daerah dapat dilihat dari berbagai ukuran kinerja yang telah dicapainya. Pengelolaan anggaran berdasarkan kinerja ini memberikan gambaran yang lebih khusus terkait dengan kemampuan suatu daerah untuk selalu menggali potensi daerah guna meningkatkan anggaran pendapatan, yang akan berdampak pada kemampuan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan daerah. Kabupaten Asmat sebagai salah satu Kabupaten di provinsi papua memiliki banyak potensi yang dapat digali untuk dapat dijadikan sumber pendapatan dari berbagai sektor. Proporsi belanja sektor sanitasi dalam APBD kabupaten Asmat untuk kurun waktu 3 tahun terakhir ini terhadap total belanja langsung terlihat stagnan dari tahun ke tahun yaitu sebesar 1%. Namun secara jumlah mengalami fluktuatif.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Kinerja Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat Provinsi Papua.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi

Sujarweni (2015:1) mendefinisikan akuntansi sebagai suatu aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihak – pihak tertentu untuk pengambilan keputusan.

Akuntansi Sektor Publik

Mahsun, Sulistiyowati dan Purwanugraha (2012:5), mendefinisikan sektor publik sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan umum dan penyediaan jasa atau barang kepada publik yang dibayar melalui pajak atau pendapatan negara lain yang diatur dalam hukum.

Karakteristik Organisasi Pemerintahan

Organisasi pemerintahan merupakan bagian dari sektor nonbisnis. Hal ini sesuai dengan kategorisasi organisasi dalam 3 kelompok menurut Jones dan Pendlebury (2010):

1. Profit-oriented, yaitu organisasi yang mempunyai tujuan utama memaksimalkan laba.

2. Type A non-profit, yaitu organisasi non laba yang seluruh atau hampir seluruh sumber daya finansialnya diperoleh dari pendapatan penjualan barang dan jasa.
3. Type B non-profit, yaitu organisasi non laba yang memperoleh sumber daya financial dalam jumlah yang signifikan dari sumber selain penjualan barang dan jasa.

Akuntansi Keuangan Daerah

Halim dalam Ratmono dan Sholihin (2015:7) menyatakan akuntansi keuangan daerah didefinisikan sebagai proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi keuangan dari entitas pemda dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak eksternal. Pihak-pihak eksternal entitas pemda tersebut antara lain Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Investor, Kreditor, Donatur, Analis Ekonomi, Rakyat dan Pemerintah Pusat.

Defenisi Pengelolaan Keuangan Negara

Dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa definisi keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mendefinisikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Pelaksanaan lebih lanjut pengelolaan keuangan daerah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 serta peraturan-peraturan daerah yang ditetapkan oleh masing-masing daerah Propinsi maupun Kabupaten/Kota.

Laporan Realisasi Anggaran

Standar Akuntansi Pemerintahan (2010:70) menyebutkan bahwa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Belanja menurut kelompok belanja terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

1. Belanja Pegawai;
2. Bunga;
3. Subsidi;
4. Hibah;
5. Bantuan Sosial;
6. Belanja Bagi Basil;
7. Bantuan Keuangan; dan
8. Belanja Tidak Terduga.

b. Belanja Langsung

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

1. Belanja Pegawai, dimaksudkan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah;
2. Belanja Barang dan Jasa; dan
3. Belanja Modal

Analisis Kinerja Belanja

Daling (2013:84) Analisis belanja daerah sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi apakah pemerintah daerah telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisien, dan efektif (value for money). Sejauh mana pemerintah daerah telah melakukan efisiensi anggaran, menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan pengeluaran yang tidak tepat sasaran. Kinerja anggaran belanja daerah dinilai baik apabila realisasi belanja lebih rendah dari jumlah yang dianggarkan, yang hal itu menunjukkan adanya efisiensi anggaran.

Penelitian Terdahulu

1. Penelitian oleh Jullita (2013), dalam penelitiannya berjudul Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara. Tujuannya adalah Independen: Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Penerapan Akuntabilitas Keuangan, dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan, Dependen: Akuntabilitas Kinerja. Teknik analisis Varians yang digunakan. Berdasarkan hasil menunjukkan bahwa secara empiris kompetensi aparatur pemerintah, penerapan akuntabilitas keuangan dan ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja Perbedaannya adalah Lokasi dan waktu penelitian.
2. Penelitian oleh Oesi Agustina. A (2013), dalam penelitiannya berjudul Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Malang (Tahun Anggaran 2007-2011). Tujuannya untuk mengetahui rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas dan rasio pertumbuhan. Metode penelitian menggunakan Metode analisis data menggunakan analisis rasio. Dari hasil analisis rasio keuangan daerah dapat disimpulkan bahwa secara umum kinerja pengelolaan keuangan daerah dan tingkat kemandirian daerah kota Malang yang terus membaik. Hal tersebut dapat terlihat dari beberapa rasio kinerja keuangan daerah yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi yang terus meningkat dan berpengaruh baik. Perbedaan dengan penelitian ini ada pada Lokasi dan waktu penelitian, metode analisis.
3. Penelitian oleh Marchelino Daling (2013) dalam penelitiannya berjudul Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. Tujuannya adalah untuk Kinerja APBD. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif. Kinerja pendapatan belum efektif hal ini terlihat dari lebih kecilnya jumlah yang terealisasi dengan yang telah dianggarkan. Sedangkan untuk kinerja belanja sudah efektif hal ini dapat dilihat dari kecilnya anggaran belanja yang terealisasi dari yang telah dianggarkan sehingga Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara melakukan penghematan dan berdampak pada adanya SILPA surplus. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian, dan kinerja pendapatan.
4. Penelitian oleh Mentari Kurnia Dharmawati (2016), dalam penelitiannya berjudul Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi. Tujuannya adalah untuk mengetahui Kinerja Keuangan Daerah, Rasio Keuangan APBD, APBD Metode penelitian yang digunakan Metode analisis data menggunakan analisis rasio. Hasil penelitian menunjukkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi sudah baik. Akan tetapi dari Berdasarkan rasio kemandirian masih rendah dan tingkat ketergantungan terhadap bantuan pihak eksternal masih tinggi, rasio efektifitas menunjukkan bahwa realisasi penerimaan PAD telah melampaui anggaran yang ditetapkan. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian, Lokasi dan waktu penelitian, metode analisis, Analisis Rasio Keuangan.

METODE PENELITIAN**Jenis Penelitian**

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi penelitian di kantor Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Asmat. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Maret-September tahun 2016.

Jenis Dan Sumber Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu jenis data, sumber data dan teknik pengumpulan data.

Jenis Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah :

- Data Kuantitatif, data yang disajikan dalam bentuk angka - angka yang tersaji dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Asmat.
- Data Kualitatif, data yang disajikan secara deskriptif dalam bentuk uraian, seperti nama satuan kerja perangkat daerah, tugas pokok dan fungsi, serta visi dan misi

Sumber Data**Data Sekunder**

Data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian dalam hal Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang meliputi data umum dan data khusus. Data umum yaitu data-data mengenai Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Struktur Organisasi, serta Visi dan Misi daerah, sedangkan data khusus yaitu data-data yang berkaitan dengan topik pembahasan.

Teknik Pengumpulan Data

Data-data dalam penulisan skripsi ini dikumpulkan dengan menggunakan metode:

- Observasi
Observasi dalam penelitian ini yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan terhadap aktivitas Satuan Kerja Perangkat Daerah khususnya di Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- Dokumen
Metode ini relatif mudah dilaksanakan dan apabila ada kekeliruan mudah diganti karena sumber datanya tetap. Dalam penelitian ini kajian dokumen dilakukan dengan meminta langsung terhadap sistem pengelolaan keuangan daerah dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Prosedur Penelitian

Dalam prosedur penelitian ini penulis melakukan tahapan-tahapan penelitian yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, tahapan tersebut sebagai berikut:

- Survey
Langkah awal adalah mengidentifikasi masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Kemudian menentukan judul penelitian yang sesuai.
- Identifikasi Objek dan Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini objek yang akan diteliti adalah Pemerintah Daerah kabupaten Asmat dan data diambil pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

3. Hasil penelitian
Hasil Penelitian diperoleh dengan menganalisa data yang telah peroleh dan diolah berdasarkan tujuan penelitian ini.
4. Analisis data
Setelah memperoleh data berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) maka, penulis menganalisis data yang ada sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya.
5. Penarikan Kesimpulan
Menarik kesimpulan dan memberikan saran berdasarkan Analisis kinerja belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran dalam penelitian ini.

Teknik Analisis Data

Tahap-tahap yang dilakukan untuk analisis data berdasarkan informasi pada Laporan Realisasi Anggaran, kita dapat melakukan analisis anggaran belanja dengan cara:

1. Analisis Varians Belanja
2. Analisis Pertumbuhan Belanja
3. Analisis Keserasian Belanja (Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja, dan Analisis Belanja Modal terhadap Total Belanja)
4. Analisis Efisiensi Belanja.

Defenisi Operasional Variabel

1. Analisis Kinerja
 - menyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yg sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sabagainya) ; kemampuan kerja
 - menyelidikan terhadap suatu metode (dalam hal ini metode Kuantitatif) untuk mengetahui kemampuan kerja belanja.
2. Belanja
 - Uang yang dikeluarkan untuk suatu keperluan; ongkos; biaya:
 - Proses, perbuatan, cara membelanjakan; pengeluaran uang.
3. Pemerintah Kabupaten Asmat

Objek penelitian:

- Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah kabupaten Asmat. Guna menilai pencapaian indikator kinerja sasaran digunakan skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 1. Skala Ordinal

No	Capaian Kinerja	Keterangan
1	Nilai 85 s/d 100	BAIK
2	Nilai 70 s/d >85	CUKUP
3	Nilai 55 s/d <70	SEDANG
4	Nilai <55	KURANG

Sumber: LAKIP KAB.Asmat

Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Pada pos belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran, belanja dan transfer Kabupaten Asmat untuk Tahun anggaran 2013 adalah senilai Rp.1.137.527.505.117,00 dari yang dianggarkan adalah senilai Rp.1.261.235.247.836,00, dan untuk tahun anggaran 2014 adalah senilai Rp.1.165.266.497.096,00 dari yang dianggarkan senilai Rp.1.302.972.449.249,00, sementara untuk tahun anggaran 2015 adalah senilai Rp. 1.246.180.421.947,00 dari yang dianggarkan senilai Rp. 1.512.623.793.660,00.

Pembahasan

Analisis Varians Belanja

Analisis varians merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran yang telah dimanfaatkan oleh Pemerintah termasuk Kabupaten Asmat. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran yang disajikan, pembaca laporan dapat mengetahui secara langsung besarnya varians anggaran belanja dengan realisasinya yang bisa dinyatakan dalam bentuk nilai nominalnya atau persentasenya. Kinerja belanja pemerintah daerah Kabupaten Asmat dinilai baik apabila jika realisasi belanja lebih besar dari jumlah yang dianggarkan, maka hal itu mengindikasikan adanya kinerja anggaran yang kurang baik.

Berdasarkan data yang berkaitan dengan Anggaran Belanja dan Realisasinya tersebut di atas, maka dapat di hitung Varians Belanja selama 3 tahun berikut ini:

Tabel 2. Analisis Varian Belanja Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2013-2015

Belanja Daerah	Tahun Anggaran		
	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)
Anggaran Belanja	1.261.235.247.836	1.302.972.449.249	1.512.623.793.660
Realisasi Belanja	1.137.527.505.117	1.165.266.497.096	1.246.180.421.947
Varian Belanja	123.707.742.719	137.705.952.153	266.443.371.713
Persentase	90,19%	89,43%	82,39%

Sumber: DPPKAD Kab.Asmat 2013-2015

Tabel 2. tersebut diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2013 persentase anggaran terealisasi 90,19% dari total anggaran belanja ini menunjukkan angka persentase yang baik karena tidak lebih dari yang dianggarkan, untuk tahun 2014 menunjukan dimana pesentase anggaran terealisasi 89,43 dan tahun 2015 persentase realisasi anggaran sebesar 82,39% sampai dengan tahun 2015 varian belanja menunjukan angka persentase yang cukup baik. Dalam hal ini berarti bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat telah memanfaatkan anggaran belanja dengan baik dimana realisasi belanja yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat lebih kecil dari Anggaran yang telah direncanakan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Analisis Varians Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat telah memanfaatkan APBD dengan baik.

Analisis Pertumbuhan Belanja

Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui pertumbuhan belanja yang dianggarkan Pemerintah Daerah dari tahun ke tahun positif atau negatif. Pertumbuhan belanja Pemerintah Kabupaten Asmat selama Tahun 2013 sampai dengan 2015 berikut ini:

Tabel 3. Analisis pertumbuhan Belanja

Belanja Daerah	Tahun Anggaran		
	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)
Realisasi Anggaran Belanja	1.137.527.505.117	1.165.266.497.096	1.246.180.421.947
Pertumbuhan Belanja		27.738.991.979	80.913.924.851
Keterangan		Positif 2,44 %	Positif 6,94 %

Sumber: DPPKAD Kab.Asmat 2013-2015

Dari tabel 3. tersebut di atas menunjukkan bahwa selama tahun 2014 mengalami kenaikan positif dimana 2,44% dan tahun 2015 mengalami kenaikan positif 6,94% dimana terdapat pertumbuhan tiap tahunnya ini menunjukkan pertumbuhan belanja adalah positif secara umum pemanfaatan belanja dalam APBD selalu mengalami pertumbuhan yang baik.

Analisis Keserasian Belanja

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja secara optimal. Keberpihakan pemerintah Daerah kepada masyarakat dalam penyediaan infrastruktur, layanan publik dan lain-lain yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dapat diketahui sejauh mana Pemerintah Daerah membelanjakan APBD yang diperuntukan ke arah itu. Rasio-rasio tersebut dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat sebagai berikut:

a. Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja

Tabel 4. Rasio Belanja Operasi terhadap total belanja

Belanja Daerah	Tahun Anggaran		
	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)
Realisasi Belanja Operasi	799.987.239.243	852.444.793.605	828.186.382.939
Realisasi Total Belanja	1.137.527.505.117	1.165.266.497.096	1.246.180.421.947
Rasio Belanja Operasi dan Total Belanja (%)	70,33 %	73,15 %	66,46 %

Sumber: DPPKAD Kab.Asmat 2013-2015

Tabel 4. diatas dapat diketahui bahwa Analisis belanja operasi terhadap total belanja daerah dari Tahun Anggaran 2013 sampai dengan Tahun Anggaran 2015 yaitu untuk tahun 2013 sebesar 70,33%, tahun 2014 sebesar 73,15%, dan tahun 2015 sebesar 66,46%. Dari analisis rasio ini terlihat bahwa pada tahun 2014 total belanja meningkat sebesar 2,82% dan pada tahun 2015 belanja operasi tidak meningkat sehingga rasio belanja langsung mengalami penurunan sebesar 6,69% 2013 yang dinilai stabil. Pemerintah Kabupaten Asmat dalam mengalokasikan belanjanya memiliki kecenderungan prosentase yang cukup besar belanja yang digunakan untuk belanja operasi dimana selama tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, rata-rata belanja operasi mencapai 70,00% dari keseluruhan belanja. Belanja operasi dengan alokasi sebesar rata-rata 70,00% digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan.

b. Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja**Tabel 5. Rasio Belanja Modal Terhadap Total belanja**

Belanja Daerah	Tahun Anggaran		
	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)
Realisasi Belanja Modal	333.145.551.615	312.533.520.491	282.487.897.109
Realisasi Total Belanja	1.137.527.505.117	1.165.266.497.096	1.246.180.421.947
Rasio Belanja Modal dan Total Belanja (%)	29,29 %	26,82 %	22,67 %

Sumber: DPPKAD Kab.Asmat 2013-2015

Tabel 5. diatas dapat diketahui bahwa pemerintah kabupaten Asmat hanya mengalokasikan belanja modal rata-rata selama tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 hanya 26,15%.

Analisis Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Angka yang dihasilkan dari rasio efisiensi ini tidak bersifat absolut, tetapi relatif. Artinya tidak ada standar baku yang dianggap baik untuk rasio ini. Kita hanya dapat mengatakan bahwa tahun ini belanja pemerintah daerah relatif lebih efisien dibanding tahun lalu. Berikut ini akan kami sajikan data yang telah disajikan pada tabel tersebut diatas, maka rasio efisiensi belanja Kabupaten Asmat Tahun 2013 sampai dengan 2015 adalah sebagaimana tersaji pada tabel 4.6 berikut ini :

Tabel 6. Rasio Efisiensi Belanja

Belanja Daerah	Tahun Anggaran		
	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)
Realisasi Belanja	1.137.527.505.117	1.165.266.497.096	1.246.180.421.947
Anggaran Belanja	1.261.235.247.836	1.302.972.449.249	1.512.623.793.660
Rasio Efisiensi Belanja (%)	90,19 %	89,43 %	82,39 %

Sumber: DPPKAD Kab.Asmat 2013-2015

Tabel 6. diatas memperlihatkan bahwa selama kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Asmat telah melakukan efisiensi belanja mulai dari tahun 2013 sampai tahun 2015 kurang dari 100 persen dimana semakin kecil rasio belanja maka semakin efisien, begitu pula sebaliknya. APBD akan efisien jika rasionya kurang dari 100 persen dan sebaliknya.

PENUTUP**Kesimpulan**

Berdasarkan dari 4 analisis yang digunakan untuk mengukur Kinerja belanja Kabupaten Asmat menunjukkan bahwa, kinerja belanja kabupaten Asmat menunjukkan hasil yang positif dan baik yaitu sebagai berikut:

- a. Analisis varians belanja.
Selama tahun 2013-2015 varian belanja menunjukkan pemerintah Kabupaten Asmat telah memanfaatkan anggaran belanja dengan baik dimana, realisasi anggaran lebih kecil dari anggaran yang telah direncanakan.
- b. Analisis Pertumbuhan Belanja.
Belanja pemerintah kabupaten Asmat mengalami kenaikan tiap tahunnya, ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah dalam menyusun anggarannya mengalami pertumbuhan tiap tahunnya, dan alasan kenaikan biaya berkaitan dengan kurs dan inflasi.
- c. Analisis Keserasian Belanja.
Pemerintah kabupaten Asmat masih memberikan porsi dana yang besar untuk belanja operasi dibandingkan untuk belanja modal.
- d. Analisis Efisiensi Belanja.
Dilihat dari rasio efisiensi belanja pemerintah kabupaten Asmat telah melakukan efisiensi belanja dimana, semakin kecil rasio belanja maka semakin efisiensi.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

- a. Varians belanja, pertumbuhan belanja, efisiensi belanja yang sudah bagus agar terus tingkatkan rasionya, dilain pihak pemerintah daerah Kabupaten Asmat juga harus meningkatkan PAD nya dengan mencari dan menggali sumber-sumber PAD yang potensial dan mendorong masyarakat untuk lebih meningkatkan kesadarannya untuk membayar pajak, retribusi dan lain-lain. Perlu diperhatikan juga dalam menggali PAD Perlu diperhatikan pula Asas adil dan manfaatnya bagi masyarakat.
- b. Agar asas adil dan manfaat bagi masyarakat dapat lebih dirasakan, maka Pemerintah daerah Kabupaten Asmat lebih memperhatikan Keserasian belanja antara belanja operasi dan belanja modal. Belanja yang lebih menyentuh kepada masyarakat dan infrastruktur yang menopang pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat lebih diperhatikan.
- c. Sebagai daerah di negara berkembang, peranan Pemerintah Daerah untuk memacu pelaksanaan pembangunan relatif besar. Oleh karena itu, rasio belanja modal yang masih kecil perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan di Kabupaten Asmat
- d. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan belanja daerah secara khusus dan APBD secara umum.
- e. Kiranya penelitian ini dapat menjadi bahan acuan bagi penelitian selanjutnya, agar dapat meneliti kinerja belanja secara lebih rinci terhadap Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Sehingga akan selalu ada perubahan kearah yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, Abdul, (2012). *Akuntansi Sektor Publik*, Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi 4, penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Jullita (2013) Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara. (jurnal.umsu.ac.id/index.php/kumpulandosen/article/.../pdf_11). Diakses tanggal 6 desember 2016.
- Jones, R. dan Pendlebury M. 2010, "*Public Sector Accounting Sixth Edition*". Prentice Hall: London.
- Mahsun, Moh., Sulistiyowati, Firma., dan Purwanugraha, H, A., 2011, "*Akuntansi Sektor Publik Edisi Ketiga*". Penerbit BPFE: Yogyakarta
- Marchelino Daling (2013) Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal EMBA Vol.1 No.3 September 2013*, Hal. 82-89

(<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/viewFile/1942/1539>). Diakses tanggal 6 Desember 2016.

- Mentari Kurnias Dharmawati (2016) Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi. Artikel Ilmiah Mahasiswa 2016 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember (UNEJ). (repository.unej.ac.id/.../MENTARI%20KURNIA%20DHARMAW...). Diakses tanggal 6 Desember 2016
- Oesi Agustina. A (2013) Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Malang (Tahun Anggaran 2007-2011) *jurnal fakultas ekonomi dan bisnis Universitas brawijaya Malang*74-*(jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/394). Diakses tanggal 6 Desember 2016
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, PP No. 71 Tahun 2010
- Ratmono, Dwi. dan Mahfud Solihin, 2015. “*Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*”. Penerbit UPP STIM YKPN: Yogyakarta.
- Sujarweni, V Wiratna. 2014. “*Metodologi Penelitian*”. Penerbit Pustaka Baru Press: Yogyakarta.
- Sujarwono. 2011. “*Akuntansi Pengantar Bagian Satu Proses Penciptaan Data Pendekatan Sistem*”. Penerbit BPFE: Yogyakarta.

